

Pandangan Feminisme Poskolonial terhadap Upaya Amerika Serikat dalam Mempromosikan Hak Perempuan di Afghanistan Paska 9/11

**Kintan Harum Puspita, Ihsan Fuad,
Jacky Nevo Tambajong, Nuraeni**
Universitas Padjadjaran

Abstrak

Dalam dekade terakhir, dunia telah menyaksikan partisipasi aktif negara-negara maju dalam mempromosikan dan menyebarkan agenda-agenda kesetaraan dan keadilan gender. Di beberapa kasus, perjuangan hak-hak perempuan dapat digunakan sebagai pembenaran atas perang dan perubahan rezim. Fenomena ini mendapat dukungan dari feminis liberal barat, yang mendominasi dukungan terhadap pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Berbeda dengan feminis liberal, feminis poskolonial memandang dukungan negara-negara utara terhadap perempuan di negara-negara selatan dengan penuh kecurigaan. Mereka berargumentasi bahwa isu-isu feminis dikooptasi oleh negara-negara utara untuk memajukan kepentingan geopolitik dibandingkan dukungan tulus terhadap hak-hak perempuan. Artikel ini bertujuan meninjau kembali secara kritis dukungan negara-negara utara terhadap perempuan negara-negara selatan dengan melakukan studi kasus mengenai perjuangan feminis Amerika mempromosikan hak-hak perempuan di Afghanistan. Upaya internasional yang dipimpin Amerika dalam mendukung perempuan Afghanistan mencapai kesetaraan politik dan sosial dijelaskan dan dianalisis dengan kaca mata feminis poskolonial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam membahas hak-hak perempuan di Afghanistan.

Kata Kunci: Afghanistan; Feminisme Liberal; Feminisme Poskolonial; Pemberdayaan; Hak Perempuan.

Abstract

In the last decade, the world has witnessed the active participation of developed countries in promoting and spreading gender equality and justice agendas. In some cases, the issue for women's rights can be used as a justification for war and regime change. This phenomenon has been supported by western liberal feminists, who dominate support for women's empowerment throughout the world. In contrast to liberal feminists, postcolonial feminists view the support of northern countries for women in southern countries with suspicion. They argue that feminist issues are co-opted by northern countries to advance geopolitical interests rather than genuine support for women's rights. This article aims to critically review the support of northern countries for women in southern countries by conducting a case study of the American feminist struggle to promote women's rights in Afghanistan. The American-led international efforts to support Afghan women in achieving political and social equality are explained and analyzed through a postcolonial feminist lens. This research is expected to provide a broader perspective in discussing women's rights in Afghanistan.

Keywords: Afghanistan; Empowerment; Liberal Feminists; Postcolonial;

Latar Belakang

Konflik memberikan dampak besar terhadap berbagai pihak, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran, perempuan dan anak-anak rentan menjadi korban baik langsung maupun tidak langsung. Kasus kekerasan berbasis gender seringkali terjadi di zona konflik, bahkan dijadikan bagian strategi dalam konflik atau perang untuk menghancurkan mental lawan. Menurut laporan PBB dalam *Women and Conflict: An Uphill Battle*, 2024, angka kematian ibu di negara-negara yang sedang atau telah mengalami konflik meningkat hingga 2,5 kali lebih tinggi dari rata-rata. Ini adalah situasi yang kompleks dan sepertinya tak terhindarkan di berbagai konflik tak terkecuali di Afghanistan.

Afghanistan telah berada di situasi konflik yang berkepanjangan. Perempuan di Afghanistan sangat rentan terhadap berbagai situasi marginalisasi dan opresi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, terutama rezim-rezim yang memiliki pandangan patriarkis kuat. Hal itu kerap diperburuk karena kekuatan kelompok kepentingan dengan pandangan konservatif yang juga mendukung pandangan tersebut, seperti ulama, pemimpin perang, dan pemimpin suku (Akbari dan True 2024). Situasi perempuan Afghanistan menjadi sorotan di berbagai media internasional digambarkan telah lama menghadapi ketidakadilan dan penindasan di tengah perebutan kekuasaan, diantaranya yang terbaru adalah pembatasan partisipasi perempuan di perguruan tinggi di bawah rezim Taliban (UNESCO 2024). Kondisi ini mengundang banyak respons dari negara-negara, organisasi internasional serta para aktivis perempuan yang prihatin dengan kemunduran dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang secara aktif menjadikan hak-hak perempuan di Afghanistan sebagai bagian dari agenda kebijakan luar negeri mereka, di samping isu terorisme, yang digunakan untuk menjustifikasi dalam intervensi pasca tragedi 9/11.

Seperti yang dikemukakan oleh Sharan (2023), sejak 2001, Afghanistan menjadi tempat eksperimen bagi para aktor internasional yang membawa agenda “perdamaian liberal,” memperkenalkan jaringan kerja diplomat, lembaga bantuan internasional dan regional, serta organisasi non-pemerintah, di samping wacana hak asasi manusia, kesetaraan gender, kebebasan, dan demokrasi untuk membangun kembali negara tersebut. Sesuai dengan pernyataan tersebut, Amerika Serikat memulai misinya di Afghanistan dengan tujuan memerangi terorisme dan memperkuat demokrasi. Di antara banyak tujuan yang diuraikan, salah satu fokus utamanya adalah peningkatan hak-hak perempuan di negara yang telah mengalami ketidaksetaraan gender selama beberapa dekade. Taliban telah banyak memberlakukan apartheid gender atau pembatasan hak-hak

perempuan di negara yang telah mengalami ketidaksetaraan gender selama beberapa dekade. Taliban telah banyak memberlakukan apartheid gender atau pembatasan hak-hak berbasis gender terhadap perempuan di Afghanistan sejak tahun 1996 (Alvi 2011).

Selama Rezim Taliban dari tahun 1996 hingga 2001, selain banyaknya kasus penindasan dan marginalisasi terhadap perempuan, warga negara Afghanistan juga hidup dalam ketakutan karena teror yang dilakukan Taliban (Popal dan Walsh 2021). Bahkan, negara tersebut juga terperosok dalam kemiskinan dan keputusasaan. Taliban memang telah berhasil digulingkan oleh koalisi internasional pasca tragedi 9/11, tetapi, beberapa dekade kemudian Taliban mengancam akan kebangkitannya kembali di Afghanistan. Kebangkitan kembali Taliban tak hanya akan mengancam warga dan negara Afghanistan, tetapi Amerika juga akan mengalami kerugian besar jika mereka kembali berkuasa.

Menurut Smith (2024), Pengaruh Amerika di Afghanistan akan berkurang drastis jika Taliban berkuasa kembali, melemahkan kontrol serta daya tawar di kawasan tersebut. Selain itu, dilema dalam pemberian bantuan kemanusiaan muncul, karena dukungan tersebut dapat memperkuat posisi Taliban dan menambah legitimasi mereka. Kebangkitan ini juga menghadirkan risiko baru terhadap stabilitas regional dan keamanan global, serta menantang kemampuan Amerika dalam mendorong nilai-nilai seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Pembatasan ini berpotensi mempengaruhi citra Amerika sebagai advokat hak asasi di panggung internasional.

Intervensi militer Amerika Serikat di Afghanistan dilatarbelakangi oleh sentimen yang menyerukan kesadaran dan tindakan atas nama perempuan Afghanistan sebagai bagian dari apa yang disebut “war on terror” oleh George W. Bush. Selama masa pemerintahan Taliban yang keras, perempuan di Afghanistan mengalami pembatasan hak yang signifikan. Menurut Gallagher (2019) dalam artikel *To Protect Afghan Women’s Rights, U.S. Must Remain Engaged*, mereka diwajibkan untuk selalu mengenakan burqa dan dilarang bekerja. Pendidikan bagi anak perempuan pun dibatasi hanya hingga usia delapan tahun, dengan fokus utama pada pembelajaran Alquran. Maka dari itu, pemerintahan Bush dengan strategis menyoroti perlakuan Taliban terhadap perempuan di Afghanistan dengan menggalang dukungan akan intervensi militer di Afghanistan. Hal ini diperkuat dengan narasi yang disampaikan Bush (2001) bahwa meskipun serangan 9/11 terjadi di tanah Amerika, serangan tersebut merupakan “serangan terhadap hati dan jiwa dunia beradab”. Tindakan Amerika ini mengaitkan keamanan nasional dengan keprihatinan terhadap situasi kemanusiaan secara umum dan kelompok-kelompok rentan secara khusus, sehingga menjadikan intervensi militer

asing sebagai kewajiban moral untuk melindungi perempuan di Afghanistan (Shepherd 2006).

Amerika dan sekutu-sekutunya dalam NATO serta negara-negara non-NATO, melalui “narasi perempuan Afghanistan,” juga memanfaatkan isu ini untuk memperkuat citra internasional mereka sebagai pelindung hak asasi manusia dan demokrasi. Hal ini memungkinkan negara-negara tersebut mempertahankan citra sebagai “warga dunia yang baik” dalam kampanye global War on Terror (Maley dan Schmeidl 2015). Dalam hal ini, pendekatan feminisme poskolonial relevan karena fokusnya pada kritik terhadap penggunaan narasi ‘penyelamatan’ perempuan yang dilakukan oleh negara-negara Barat untuk kepentingan geopolitik, yang sering kali mengesampingkan konteks lokal dan pemahaman perempuan Afghanistan itu sendiri.

Namun demikian, argumen tersebut sangat mudah untuk disalahgunakan sebagai pembenaran tindakan-tindakan yang tidak ada hubungannya dengan isu perempuan, dan bahkan memperburuk keadaan yang dihadapi oleh perempuan di wilayah konflik. Pandangan feminis poskolonial menegaskan bahwa narasi semacam ini seringkali mengaburkan kompleksitas hubungan gender dalam konteks budaya dan sejarah tertentu, terutama dalam konteks intervensi aktor-aktor yang lebih kuat seperti yang terjadi di masa kolonialisme dalam menanamkan bahkan memaksakan agenda-agenda negara penjajah sebagai sesuatu yang lebih baik bagi masyarakat jajahan, termasuk perempuan. Sejalan dengan hal tersebut, Spivak (1988) menggarisbawahi bahwa subaltern, khususnya perempuan dalam konteks masyarakat kolonial, sering kali tidak memiliki suara yang diakui dalam sejarah resmi, di mana suara mereka menjadi “diam” atau disalurkan melalui lensa kolonial dan kepentingan kekuasaan.

Berkaitan dengan hal ini, posisi Amerika Serikat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan mereka untuk menegaskan posisi mereka sebagai negara adikuasa. Kekerasan epistemik atau *epistemic violence* yang digambarkan Spivak turut menyoroti bagaimana pandangan kolonial ini menciptakan struktur pengetahuan yang mendominasi suara asli perempuan asli perempuan lokal dan meminggirkan upaya perempuan Afghanistan sendiri dalam memperjuangkan hak mereka, seolah-olah hanya melalui intervensi Barat mereka bisa diselamatkan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa narasi penyelamatan sering kali berfungsi untuk mendefinisikan pengalaman perempuan lokal sesuai kepentingan negara kuat, alih-alih memberi ruang bagi keberagaman dan otoritas pengalaman mereka sendiri.

Feminisme poskolonial mengkritik upaya universalitas cita-cita feminis Barat, menekankan pentingnya memahami penindasan gender dalam

konteks warisan kolonial dan imperialisme budaya. Pasca 9/11, Amerika mencoba memaksakan gagasan Barat tentang hak-hak perempuan di Afghanistan, yang berisiko mereproduksi dinamika kolonial dan melemahkan hak perempuan Afghanistan itu sendiri (Shepherd 2006). Meskipun perempuan Afghanistan menjadi fokus utama dalam retorika pembebasan Amerika, banyak dari mereka tetap dalam kondisi rentan dan terpinggirkan. Kekerasan berbasis gender meningkat dan angka kematian ibu tetap tinggi, yang mana mencerminkan kompleksitas situasi ini. Intervensi Amerika sering kali dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik daripada kepedulian tulus terhadap hak-hak perempuan. Akibatnya, agenda feminis Barat tanpa mempertimbangkan konteks lokal dapat memperkuat sistem dominasi dan imperialisme budaya, bukannya membebaskan perempuan Afghanistan (Miller 2010).

Implementasi inisiatif hak-hak perempuan di Afghanistan pasca 9/11 penuh dengan tantangan dan kontradiksi. Sebelum kembalinya Taliban pada Agustus 2021, kemajuan signifikan terjadi di bawah otoritas Pemerintah Nasional Afghanistan dalam berbagai bidang seperti akses terhadap pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan publik (Gallagher 2019). Namun, nyatanya kemajuan yang terjadi masih belum merata dan meluas. Hambatan struktural, termasuk sikap patriarki yang berakar dan diskriminasi yang dilembagakan tetap ada, meskipun ada upaya internasional untuk menghilangkan hambatan tersebut. Misalnya, berdasarkan laporan dari United Nations Missions in Afghanistan (UNAMA) dan the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) pada Desember 2020 mengenai implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan atau *EVAW Law* menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam respons sektor keadilan, sistem peradilan Afghanistan masih gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan. Dari 303 kasus kekerasan yang didokumentasikan, hanya setengah yang mencapai pengadilan utama, sementara banyak kasus diselesaikan melalui mediasi yang sering kali tidak memadai. Ditambah lagi, situasi keamanan yang tidak stabil memperburuk efektivitas program hak-hak perempuan dan meningkatkan risiko bagi aktivis perempuan yang memperjuangkan keadilan.

Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, lebih cenderung melihat hak-hak perempuan dari kacamata feminisme liberal yang memiliki kecenderungan bias Barat dan mengesampingkan gerakan perempuan domestik dan organisasi akar rumput yang lebih memahami situasi dan kondisi yang dihadapi perempuan Afghanistan secara langsung. Sebagaimana dijelaskan oleh Kandiyoti (2007), dukungan terhadap peran publik perempuan di Afghanistan lebih sering terbatas pada wilayah perkotaan dan bergantung

pada sektor negara yang berkembang. Di sisi lain, organisasi perempuan lokal cenderung lebih mampu memahami dan menangani dinamika kekerasan berbasis gender yang kompleks, termasuk kekerasan yang digunakan sebagai alat politik oleh berbagai aktor sosial, sehingga mampu memberikan dukungan yang lebih kontekstual sesuai dengan realitas sosial perempuan Afghanistan.

Lebih lanjut, dalam upaya internasional untuk membangun tatanan politik pasca-Taliban, donor asing berperan besar dalam mendorong hak-hak perempuan melalui inisiatif seperti proses konstitusional Afghanistan. Proses ini, yang diinisiasi melalui Kesepakatan Bonn pada tahun 2001, berupaya mewujudkan pemerintahan yang representatif dan sensitif terhadap gender. Namun, kurangnya perjanjian perdamaian yang komprehensif dan inklusif menciptakan berbagai kontradiksi, termasuk ketidaksepakatan terkait status perempuan dalam hukum Islam yang diklaim kelompok jihadi konservatif, yang menghalangi konsensus politik untuk stabilitas jangka panjang (Kandiyoti 2007). Meskipun konstitusi baru disahkan pada 2004 dan menegaskan representasi perempuan dalam legislatif, intervensi ini secara tidak langsung berisiko meminggirkan suara dan aspirasi perempuan Afghanistan di tingkat akar rumput. Dengan mengistimewakan intervensi Barat, upaya ini berpotensi melanggengkan narasi neokolonial yang berupaya “menyelamatkan” perempuan Afghanistan dari budaya mereka sendiri. Maka dari itu, diperlukan adanya pendekatan yang lebih baik secara kontekstual untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan, dengan memusatkan suara dan agensi perempuan Afghanistan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial yang lebih luas.

Metode

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Tipe penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan suatu fenomena sosial serta menjawab pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, siapa dan bagaimana secara komprehensif (Untung 2019). Kemudian, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode yang dikembangkan oleh John H. Krantz, yaitu metode berbasis internet. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data berupa kata maupun kalimat yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis kualitatif ini melibatkan pemeriksaan dokumen kebijakan, laporan, serta literatur akademis untuk menganalisis perspektif feminis poskolonial terhadap upaya Amerika dalam menegakkan hak perempuan di Afghanistan pasca tragedi 9/11. Artikel ini juga mengaitkan hak asasi manusia, hak perempuan, feminisme poskolonial dan interseksionalitas sebagai konsep-konsep utama yang digunakan dalam kerangka analisis untuk mendapatkan pemahaman kritis yang lebih mendalam terhadap fenomena keterlibatan Amerika Serikat dalam isu-isu perempuan di Afghanistan.

Kerangka Teoritis

Women's Rights is Human Rights

Pernyataan “*Women's Rights is Human Rights*” memberikan penegasan kembali terhadap kapasitas dan kapabilitas perempuan untuk hidup bebas dan memiliki hak dan martabat yang setara serta menjadi bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Dengan demikian, semua pihak termasuk negara wajib mengakui dan menjamin pemenuhan hak-hak atau ‘*rights and entitlements claimed*’ untuk perempuan dan anak-anak perempuan. Sikap tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya kebijakan-kebijakan yang memastikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak perempuan, sebagaimana telah tertulis dalam bagian dari Hak Asasi Manusia. Namun, slogan ini condong menjadi seruan pemersatu bagi feminis gelombang kedua yang melampaui teori akademis dan mendorong gerakan politik internasional untuk memasukkan pengalaman perempuan ke dalam pusat diskusi hak asasi manusia.

Kesadaran akan penegakkan Hak Asasi Perempuan ini dapat mentransformasi peran dan partisipasi perempuan di berbagai aspek kehidupan, terutama mendapatkan kesempatan dan penghargaan yang sama dengan laki-laki. Mendukung pandangan Bunch (1990), kegagalan masyarakat dalam berperspektif sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan isu-isu kekerasan berbasis gender dikarenakan hak asasi tradisional yang menjadi sorotan utama. Sehingga, hal tersebut membutuhkan pendekatan definisi hak asasi manusia universal yang lebih transformatif dan tindakan yang lebih mengangkat identitas personal sebagai perempuan. Piagam PBB sesungguhnya telah mengamanatkan upaya untuk memperhatikan hak perempuan secara menyeluruh dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Piagam PBB, terutama poin yang diangkat sebagai tujuan utama yaitu; “*to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, [and] in the equal rights of men and women*”. Poin tersebut sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, Piagam PBB menempatkan kesetaraan gender sebagai nilai fundamental dalam penegakkan Hak Asasi Manusia serta perwujudan perdamaian dunia. Dengan demikian, *Women's Rights is Human Rights* memiliki justifikasi normatif sekaligus institusional dalam hubungan internasional.

Feminisme Poskolonial

Feminisme poskolonial dipahami sebagai pendekatan yang melihat gender, ras, kelas dan interseksi kolonialisme (Crenshaw 1989). Hal tersebut membuka perspektif dan persepsi bagaimana sistem kolonial yang ada saat itu dapat berdampak serta menjadi media untuk melawan penindasan yang didapat dari berbagai struktur kekuasaan yang besar pada saat itu. Sebelumnya, feminisme poskolonial muncul sebagai reaksi terhadap para pendukung awal teori poskolonial, dimana poskolonial fokus pada para lelaki yang sibuk membangun bangsa setelah imperialisme dan kolonialisme menghancurkan sejarah masyarakat adat. Teori ini mengkritik pemerintahan kolonial dan kekuasaan hegemonik yang dibangun oleh masyarakat adat setelah masa kemerdekaan, mengatasi kesenjangan dalam hubungan kekuasaan hegemonik dengan mengkaji hubungan antara penjajah dan penjajahan, serta kritik terhadap peran gender pascakolonial. Feminisme poskolonial tidak hanya berfokus pada patriarki sebagai sumber penindasan tetapi juga mengkaji bagaimana kesenjangan sosial ditempatkan dan dibentuk dalam konteks politik, sejarah, budaya, dan ekonomi (Crenshaw 1989). Untuk itu, selama perjalanan perkembangan ini feminisme poskolonial juga sudah memasukkan elemen interseksionalitas dalam memahami hubungan antar aktor beserta kompleksitas, dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kolonialisme maupun pola-pola hubungan lainnya yang menciptakan penindasan.

Perdebatan yang paling penting dalam teori ini adalah mengenai Timur dan Barat. Hierarki Barat dan budaya dalam teori feminis poskolonial berkisar pada sosok “perempuan Dunia Ketiga” dan posisi perempuan Dunia Pertama (Barat). Chandra Talpade Mohanty (1984) menyatakan hal ini sambil mengkritik keilmuan feminis liberal Barat karena kecenderungan universalisnnya dan mengubah “perempuan dunia ketiga” menjadi subjek tunggal yang monolitik. Mohanty menganalisis lima cara spesifik wacana feminis Barat menampilkan perempuan Dunia Ketiga sebagai “kelompok yang dihomogenisasi dan tidak berdaya, seringkali dipandang sebagai korban potensial maupun aktual dari sistem sosial ekonomi tertentu”. Ia menantang objektifikasi perempuan Dunia Ketiga dalam karya-karya perempuan kulit putih, yang mana perempuan digambarkan sebagai “korban” dari berbagai bentuk kekerasan. Dia berpendapat bahwa representasi ini “bergantung pada gagasan umum tentang ketergantungan mereka,” yang mengarah pada reduksionisme budaya. Pandangan ini menempatkan perempuan Dunia Ketiga tidak memiliki kemampuan mandiri untuk memberdayakan atau membebaskan diri dari penindasan, sehingga tergantung kepada pertolongan perempuan dari negara maju.

Pendapat Mohanty ini juga dapat digunakan untuk menelaah kembali secara kritis penggunaan teori Feminis Poskolonial yang diterjemahkan sebagai tindakan simbolis yang mengabaikan kompleksitas sosial dan budaya lokal pasca penarikan diri Amerika Serikat dan implikasi kebijakan luar negerinya (sudut pandang negara maju) yang cenderung bersinggungan dengan perbedaan pandangan perempuan di Afghanistan. Dari perjanjian damai antara AS dan Taliban, dapat terlihat bahwa tidak adanya prioritas keterwakilan suara untuk perempuan Afghanistan dan tidak mengedepankan retorika kebebasan serta emansipasi perempuan (Al Jazeera 2020). Sehingga, tidak adanya keterwakilan suara pun dirasakan oleh para perempuan Afghanistan dan memunculkan hubungan yang dinamis melalui pergerakan yang telah dilakukan oleh kedua negara dan menghasilkan perubahan yang kosmetik pasca penarikan Amerika Serikat.

Interseksionalitas

Dari uraian di atas, terlihat bahwa isu-isu gender sangat dinamis dan terus-menerus membutuhkan tanggapan dan pemahaman baru serta berkontribusi terhadap perkembangan dari feminisme. Interseksionalitas merupakan satu respons yang kuat untuk meneruskan pola kontinuitas dari feminisme. Dalam berbagai literatur, dijelaskan posisi Interseksionalitas sebagai bagian penting dalam memahami representasi sosial seseorang (Khotimah dan Kiranantika, 2019). Seorang individu dibentuk dan dipengaruhi oleh berbagai konteks dalam kehidupannya, baik secara sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Pengalaman ketertindasan seringkali dilahirkan dari pertemuan berbagai aspek tersebut. Crenshaw membangun argumen feminis interseksionalitas melalui analisisnya mengenai fenomena diskriminasi terhadap perempuan kulit hitam. Selanjutnya, Crenshaw (1989) melihat Interseksionalitas sebagai cara dalam memetakan konseptualisasi dari berbagai macam sistem opresi dengan menghubungkan pembangun-pembangun identitas dan lokasi sosial dalam berbagai tingkatan hierarki kekuasaan. Tingkatan dan atau hierarki ini memupuk munculnya kategori sosial yang variatif dan saling terkait secara multidimensional (Collins 2019). Dengan kata lain, Interseksionalitas membentuk posisi seseorang dalam aktivitas sosialnya melalui berbagai irisan terkait dengan tingkatan-tingkatan kekuasaan tersebut.

Tidak sampai itu, persoalan irisan tersebut ternyata berpengaruh pada ketidakseimbangan relasi kuasa. Sehingga, Interseksionalitas dapat dikonstruksikan melalui cara kerja kekuasaan dalam aspek-aspek multidimensional yang melahirkan identitas sosial seseorang sebagai bagian dari kompleksitas relasi kuasa (Crenshaw 1989). Dalam konteks diskriminasi perempuan kulit hitam, Crenshaw menunjukkan bahwa pengalaman ketertindasan terjadi secara berlapis dalam relasi kuasa yang

dilatarbelakangi setidaknya sistem patriarki, rasisme sekaligus sistem ekonomi kapitalistik. Pengalaman perempuan di setiap kelompok masyarakat akan ditentukan oleh pola-pola relasi kuasa yang dominan dan sangat mungkin berbeda-beda sedemikian rupa sehingga dibutuhkan analisis khusus bagi masing-masing pengalaman perempuan untuk menghindari generalisasi dan reduksi.

Interseksionalitas menjadi instrumen analisis yang dapat memperdalam pemahaman terhadap pengalaman perempuan dalam konteks feminisme poskolonial. Korelasi yang ada menitikberatkan pada kompleksitas hirarki sosial dan ketidaksetaraan yang dirasakan oleh perempuan, sebagai hasil interaksi serta interseksi dalam lingkup sosial. Feminisme Poskolonial melihat proses “hidup” perempuan dari berbagai kejadian dalam imperialisme, kolonialisme dan rasisme (Crenshaw 1989). Secara umum, pengalaman ketertindasan perempuan pada masyarakat Poskolonial terjadi secara serentak baik di ruang publik maupun di ruang privat. Perempuan yang dibatasi untuk berekspresi di ruang publik tetapi juga menjadi sasaran pembatasan dan penghilangan hak-hak reproduksi, seperti contoh kebijakan sterilisasi bagi perempuan-perempuan suku Indian yang pernah dilakukan di Amerika Serikat. Untuk itu, Feminisme Poskolonial juga menyoroti gagasan sosial yang menegaskan kembali bahwa kebebasan perempuan mencakup kebebasan sosial yang terkait eksistensinya di ruang publik serta kebebasan dalam mengendalikan tubuh dan seksualitasnya terkait eksistensinya di ruang privat (Mohanty 1988).

Perspektif poskolonial menjadi sesuatu yang relevan dalam memahami Interseksionalitas dan sebaliknya Interseksionalitas dalam memahami perspektif Poskolonial. Interseksionalitas pun menjadi bagian dari kesibukan diskursus publik mengenai isu-isu diskriminasi perempuan dan kelompok rentan lainnya serta bukti perlawanan terhadap hierarki kekuasaan. Kekuatan Interseksionalitas berfokus pada membangun kembali pemahaman terhadap perempuan dan isu-isu perempuan dalam menyuarakan perlawanan terhadap berbagai bentuk dominasi relasi kuasa yang bersifat multidimensional dalam konteks individu maupun sosial. Dalam hal ini, Interseksionalitas dirasakan saat Amerika Serikat menggunakan dampak kebijakan luar negerinya, dengan melihat berbagai interaksi kekuasaan, identitas, dan penindasan yang dihadapi perempuan Afghanistan harus dipahami dan direspons secara lebih kompleks melalui peran struktural, baik ras, agama, budaya dan geopolitik.

Hasil dan Diskusi

Amerika Serikat menjustifikasi perang mereka terhadap Afghanistan dengan berbagai argumen berbeda untuk mendapatkan legitimasi internasional, dan dukungan domestik terhadap invasi tersebut (Dorani 2019). Salah satu pembenaran tersebut adalah argumen bahwa invasi diperlukan untuk menyelamatkan nyawa perempuan Afghanistan dari penindasan dan tirani pemerintahan Fundamentalisme Islam Taliban (Hunt 2002). Kehidupan perempuan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban sangat dibatasi oleh aturan agama, dan Burqa sebagai salah satu contohnya (Telesetskyt 1998). Pemerintahan Bush memanfaatkan Burqa sebagai simbol penindasan Taliban karena burqa memunculkan gambaran mencolok yang kontras dengan tirani Islam Timur dan Barat Bebas (Pacwa 2019). Untuk memperluas perbedaan antara Timur dan Barat, pidato Laura Bush menggambarkan betapa pentingnya upaya menyelamatkan perempuan Afghanistan untuk perdamaian dunia (Bush 2006):

Only the terrorists and the Taliban forbid education to women. Only the terrorists and the Taliban threaten to pull out women's fingernails for wearing nail polish. The plight of the women and children in Afghanistan is a matter of deliberate human cruelty carried out by those who seek to intimidate and control. Civilized people throughout the world are speaking out in horror, not only because our hearts break for the women and children in Afghanistan but also because, in Afghanistan, we see the world the terrorists would like to impose on the rest of us. Fighting brutality against women and children is not the expression of a specific culture, it's the acceptance of our common humanity, a commitment shared by people of good will on every continent.

Retorika yang digunakan para pembuat kebijakan AS di sini menunjukkan keinginan mereka untuk menggambarkan kehidupan mengerikan di bawah Taliban. Hal tersebut menunjukkan betapa berbedanya nilai-nilai kebebasan Amerika dalam memanfaatkan emosi publik, karena publik merupakan kelompok kepentingan yang harus dipenuhi dalam kehidupan politik Amerika (Alm 2021).

Penggunaan kata-kata seperti “*human cruelty*” dan “*common humanity*” menunjukkan upaya Laura Bush untuk menguniversalkan pengalaman perempuan di seluruh dunia. Dengan menguniversalkan masyarakat gender ke dalam satu gambaran yang homogen, Laura Bush mengilustrasikan Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban sebagai masyarakat yang sangat kontras dengan “*civilized world*”. Tujuan dari universalisasi ini adalah untuk memobilisasi dukungan emosional untuk tujuan perang. Pada bagian “*Fighting brutality against women and children - is a commitment shared by people of good will on every continent*” Bush menyatakan bahwa mendukung invasi Amerika adalah hal yang benar untuk dilakukan oleh semua negara beradab.

Dalam riset Alm (2021) dijelaskan bahwa Amerika Serikat membenarkan perang mereka sebagai perang demi pembebasan perempuan, dan meyakinkan rakyatnya sendiri akan kebenaran tujuan mereka. Keadilan seperti ini membantu memperoleh dukungan dari masyarakat sipil, dan menghilangkan suara-suara yang berbeda pendapat dengan mencap mereka sebagai simpatisan teroris. Di sinilah retorika Bush tentang “*War on Terror*” menyatu dengan tujuan perang yaitu pembebasan perempuan Afghanistan (Alm 2021).

Seruan perang Bush diterima oleh akademisi dan LSM feminis barat seperti *Feminist Majority Foundation*, yang melihat perang sebagai sesuatu dengan urgensi moral untuk membebaskan perempuan Afghanistan (Afghan Women and Girls n.d.). Penerimaan retorika Bush oleh feminis barat dapat dilihat dari kampanye publik ‘*Stop Gender Apartheid in Afghanistan*’ yang dipimpin oleh *Feminist Majority Foundation* (Feminist Majority Foundation 2001). Dalam kampanye publiknya, *Feminist Majority Foundation* memberikan justifikasi sendiri kepada ‘*war on terrorism*’ yaitu sebagai kesempatan untuk menghentikan apartheid gender dan memulihkan hak perempuan di Afghanistan (Russo 2006). Namun, feminis poskolonial berpendapat bahwa penggambaran perempuan Afghanistan sebagai orang yang tidak berdaya dan perlu diselamatkan dari laki-laki Afghanistan oleh orang kulit putih Amerika mengacu pada retorika imperialis abad ke-19 (Zine 2006). Oleh karena itu, meskipun tujuan untuk membebaskan perempuan mungkin tampak mulia, di balik layar Amerika memiliki tujuan lain yaitu menanamkan akar imperialisme yang mana jauh dari kata mulia (Møller 2021).

Feminis poskolonial mencurigai penggunaan narasi “Timur vs Barat” dalam rangka perang melawan Taliban yang bersifat orientalis (Abouesh 2020). Narasi tersebut memanfaatkan sikap orientalis yang dimiliki banyak orang di Barat terhadap masyarakat Islam (Zine 2006). Menurut Zine (2006) sikap-sikap ini seringkali berdampingan dengan rasa superioritas yang dimiliki orang-orang Barat mengenai nilai-nilai mereka yang lebih progresif dalam hal kesetaraan gender dalam masyarakat. Nilai-nilai progresif seperti hak perempuan untuk bekerja, bercerai, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, sikap merendahkan Barat terhadap Timur seringkali lupa bahwa perkembangan progresif ini relatif baru terjadi di Barat, dan merupakan hasil perjuangan selama berpuluh-puluh tahun. Meskipun penerimaan terhadap nilai-nilai progresif di Barat berjalan lambat, negara-negara lain di dunia tidak menerima keringanan hukuman yang sama (Song 2013). Bersama dengan negarawan yang berorientasi imperialis, para feminis barat berpartisipasi dalam misi peradaban, menuntut hak dan kebebasan bagi perempuan di dunia Islam sambil mengabaikan kondisi sosial yang melanggengkan masyarakat

patriarki tradisional, dan bagaimana kekuatan-kekuatan tersebut dibantu oleh kelompok “benar” yang sama.

Afghanistan sendiri mempunyai sejarah pergulatan yang penuh gejolak antara para pemimpin yang berpikiran progresif dan segmen masyarakat yang konservatif (Lindvall 2023). Pada beberapa titik dalam sejarahnya, para pemimpin progresif ini, mulai dari Amanullah Khan, Zahir Shah, dan Partai Komunis telah berupaya untuk menghapuskan pembatasan terhadap kebebasan perempuan namun ditentang oleh unsur-unsur konservatif yang kuat di Afghanistan (Runion 2017). Dan dalam kasus Komunis, Amerika Serikat yang memberikan bantuan militer kepada Mujahidin konservatif, pendahulu Taliban pada tahun 1980 an (Runion 2017). Maka dari itu, penulis berargumen bahwa seruan Amerika Serikat untuk berperang atas nama perempuan Afghanistan juga hipokrit karena dukungan AS terhadap Mujahidin dan pemimpin perang kuat (Gossman 2021).

Tentara Mujahidin yang mendapat dukungan dari AS berbalik dan menggencarkan kekerasan terhadap perempuan Afghanistan. Karena tentara Mujahidin didukung secara finansial dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat, perilaku kekerasan mereka juga bisa disalahkan kepada AS. Disini, Taliban muncullah sebagai kelompok anti-kolonial menolak pendudukan Afghanistan oleh Amerika Serikat dan sekutu mereka di pemimpin perang yang korup dan egois (Azami 2021). Namun, perjuangan Taliban melawan imperialisme Amerika Serikat juga memiliki kontradiksi, yaitu kebijakan mereka terhadap perempuan yang sering disebut sebagai “*gender apartheid*”. Walaupun Taliban dilihat sebagai kelompok anti-kolonial yang ingin melawan penindasan imperialisme, mereka secara langsung juga melakukan penindasan sendiri terhadap perempuan Afghanistan. Dalam hal ini, perempuan Afghanistan memiliki posisi yang sangat sulit di antara dua pihak berperang.

Realitas perang dan sifat penggulingan rezim di wilayah yang penuh konflik seperti Afghanistan menciptakan kontradiksi bagi mereka yang memperdebatkan keadilan berperang atas nama perempuan Afghanistan (How Conflict in Afghanistan Impacts Women and Girls n.d.). Sejak tahun 1980-an, perempuan Afghanistan mengalami kondisi perang yang terus-menerus (Runion 2017). Hal ini termasuk ancaman pemerkosaan, penculikan, dan pemerasan, serta peraturan agama yang membatasi yang diterapkan oleh kaum fundamentalis (Lindvall, 2023). Berdasarkan hal tersebut, keputusan pemerintahan Bush untuk melancarkan invasi secara kontinu menjerumuskan Afghanistan ke dalam konflik selama dua dekade. Jadi, bisakah orang benar-benar berpendapat bahwa Amerika Serikat berperang atas nama perempuan Afghanistan, jika perempuan Afghanistan menghadapi beban peperangan yang terus-menerus? Jika

Amerika Serikat benar-benar melakukan hal tersebut, maka kebijakan ini akan bertentangan dengan tujuan mereka sendiri karena perempuan menderita akibat memburuknya kondisi ekonomi, dan bersiap menghadapi ancaman kekerasan, baik dari Taliban maupun militer Amerika.

Namun, pendudukan Afghanistan dan pembentukan pemerintahan yang didukung internasional menciptakan era di mana perempuan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya (Lindvall 2023). Untuk sesaat, perempuan Afghanistan menikmati kebebasan sipil, kebebasan ekonomi, keterwakilan politik, dan hak atas pendidikan (Sharifullah Dorani 2019). Dengan pendanaan internasional dan dukungan Amerika, inisiatif menuju emansipasi perempuan dapat terwujud. Namun kemajuan ini terjadi karena adanya pengawasan yang signifikan dari pihak Amerika. Unsur-unsur konservatif yang mengakar dalam masyarakat Afghanistan, termasuk panglima perang, pemimpin suku, ulama, dan madrasah masih tetap berpengaruh di daerah pedesaan (Runion 2017). Kekuatan konservatif ini masih menjadi duri bagi hak-hak perempuan di Afghanistan (Lindvall 2023). Sebagai perbandingan, kekuatan progresif tidak memiliki jaringan dan pengaruh yang sama terhadap masyarakat Afghanistan sehingga mereka tetap bergantung pada dukungan internasional (Diyarbakirlioglu dan Yigit 2017).

Sifat proyek imperialis yang dilakukan Amerika di Afghanistan menimbulkan banyak permusuhan dari masyarakat Afghanistan ketika menyangkut reformasi progresif. Gagasan tentang kebebasan sipil perempuan mendapat label dari kaum konservatif sebagai sesuatu yang diimpor dari Barat yang tidak sesuai dengan cara hidup tradisional Afghanistan (Saleh, 2020). Di sinilah perspektif poskolonial mengkritik keras proyek Amerika di Afghanistan. Dengan menciptakan dinamika penguasa kolonial dengan Afghanistan melalui pendudukan, Amerika Serikat menawarkan amunisi bebas kepada kaum konservatif dan fundamentalis untuk mengkritik emansipasi perempuan sebagai "ideologi luar" yang tidak sesuai dengan tradisi Afghanistan (Bahri, 2014). Dalam penelitiannya, Bahri (2014) menemukan bahwa upaya kesetaraan gender di Afghanistan malah mengalami kemunduran di pandangan laki-laki Afghanistan yang disebabkan oleh ketidakpekaan tentara AS terhadap budaya lokal. Ketidakpekaan pasukan AS memparah dengan kejadian diluar Afghanistan juga, seperti pembakaran kitab Al-Quran di Iraq, dan penganiayaan tahanan penjara Abu Ghraib (News 2005). Konsekuensinya adalah laki-laki Afghanistan mencurigai ketulusan dari upaya Amerika untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan. Karena ketulusannya, perjuangan hak-hak perempuan tidak mendapat dukungan lintas kelas yang memadai di antara warga Afghanistan yang diperlukan untuk membuat gerakan berkelanjutan bahkan setelah Amerika menarik semua pasukannya (Sumitra et al., 2023).

Setelah perang selama dua dekade, Amerika Serikat mendapati dirinya terlibat dalam perang yang tidak populer di pihak dalam negerinya (Runion 2017). Dengan meningkatnya biaya dan kelelahan perang di kalangan masyarakat Amerika, mereka memulai penarikan pasukan militer secara perlahan dari Afghanistan sementara perundingan perdamaian dimulai dengan Taliban (Graham-Harrison dan Borger 2020). Meskipun terdapat ancaman besar yang ditimbulkan oleh Taliban terhadap hak-hak perempuan, Amerika Serikat tidak mempertimbangkan perempuan Afghanistan. Di sinilah para feminis poskolonial berpendapat bahwa Amerika Serikat hanya menggunakan hak-hak perempuan sebagai pembenaran untuk proyek imperialis.

Pada akhirnya, Amerika mengabaikan komitmen mereka terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan karena mereka menganggap upaya pemberantasan pemberontakan memakan biaya yang banyak. Pembenaran bahwa perang tersebut seharusnya dilakukan untuk membebaskan perempuan Afghanistan tampaknya merupakan manuver politik untuk membujuk kaum Feminis Barat agar mendukung proyek imperialis di Afghanistan.

Ketika Amerika meninggalkan Afghanistan, perempuan Afghanistan dibiarkan sendirian menghadapi kemarahan Taliban. Taliban hampir tidak mendapat perlawanan dan bertekad untuk memberlakukan Hukum Syariah di seluruh negeri (OHCHR 2021). Dalam urusan pengadilan dan masyarakat sipil, peralihan ke Hukum Syariah ini berarti menghidupkan kembali kontradiksi antara Laki-laki dan Perempuan dalam masyarakat Pasca-Kolonial. Pengadilan tidak lagi dijalankan secara independen oleh pengacara profesional, digantikan oleh sarjana Madrasah. Sementara itu, perempuan menyaksikan pemerintah Afghanistan mencabut perlindungan hukum mereka, sehingga menurunkan status perempuan di Afghanistan sebagai warga negara kelas dua. Selama tiga tahun, Taliban mencabut hak perempuan atas pendidikan menengah, memaksakan penggunaan Burkha, mengurangi peran perempuan dalam pemerintahan, dan kini mengancam akan melarang penggunaan suara perempuan di radio dan televisi. Pengamat internasional, mulai dari kelompok advokasi, hingga organisasi internasional, serta perwakilan pemerintah asing telah menyuarakan keprihatinan mereka terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan (amnesty.org 2022).

Memburuknya Kebebasan Sipil Perempuan di Afghanistan akan terus menjadi sumber kekhawatiran komunitas internasional (Bennoune 2024). Sebagai kekuatan hegemonik global yang memiliki kepentingan strategis di kawasan, Amerika Serikat masih memainkan peran geopolitik yang signifikan bahkan setelah penarikan diri mereka dari Afghanistan. Menurut Moghadam (2021) di wilayah MENA yang lebih luas, Amerika

Serikat menggunakan persepsi penindasan terhadap perempuan di Afghanistan dan Iran sebagai propaganda untuk membenarkan perang imperialis. Buruknya hak-hak perempuan di Afghanistan memicu stereotip yang umumnya dimiliki negara-negara Barat terhadap kawasan MENA secara keseluruhan. Stereotip-stereotip berbahaya ini kemudian dipersenjatai secara lebih luas melalui media massa sebagai cara untuk menggalang dukungan bagi perang imperialis (Zine 2006).

Dan bahkan ketika Amerika Serikat tidak berperang, mereka masih menggunakan hak-hak perempuan sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan lebih lanjut terhadap Afghanistan seperti kelanjutan sanksi dan pembekuan cadangan uang tunai sebesar \$9,5 miliar (Mohsin 2021). Bentuk perang ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Biden membawa konsekuensi besar baik bagi pemerintah Afghanistan maupun masyarakat Afghanistan, terutama perempuan. Dampaknya adalah banyak rumah tangga yang tidak mampu membeli makanan, perawatan medis, dan pembelian kebutuhan lainnya (International Rescue Committee 2022).

Kepergian pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan juga bertepatan dengan penarikan mundur donor asing, organisasi bantuan, dan NGO dari negara tersebut. Organisasi-organisasi yang pernah menawarkan layanan penting kepada warga Afghanistan tiba-tiba menghilang, dan rakyat Afghanistan tidak punya pilihan lain. Khususnya adalah kondisi yang memprihatinkan bagi perempuan yang sedang hamil, atau baru saja hamil, karena mereka memerlukan perhatian kesehatan ekstra (International Rescue Committee 2022). Akibat dari sanksi tersebut, yang dibenarkan oleh Amerika Serikat atas nama hak asasi manusia, perempuan di Afghanistan menghadapi ancaman yang lebih besar terhadap mata pencaharian mereka. Ketika Taliban merampas kebebasan sipil perempuan Afghanistan, sanksi Amerika Serikat melucuti perempuan Afghanistan dari kebutuhan dasar untuk hidup. Atas nama hak-hak perempuan, kehidupan perempuan dirugikan.

Kesimpulan

Akibat konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun, perempuan Afghanistan telah lama menderita, terutama mengenai ancaman kekerasan serta pembatasan agama. Meskipun terdapat kemajuan dalam hak-hak perempuan, menurut perempuan Afghanistan invasi Amerika hanya memperpanjang penderitaan mereka, mengingat fakta bahwa kekuatan konservatif di Afghanistan tetap kuat. Invasi Amerika ini dapat dinilai sebagai proyek imperialis yang tidak memahami dinamika lokal Afghanistan. Maka dari itu, timbul permusuhan dari masyarakat Afghanistan serta kaum konservatif mengenai kritik terhadap emansipasi

perempuan sebagai sesuatu yang diimpor dari Barat. Ketika Amerika mulai menarik kembali pasukannya, komitmen mereka terhadap hak-hak perempuan Afghanistan pun diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa justifikasi perang atas nama perempuan merupakan manuver politik mereka dan kontradiktif dengan tujuan awal serta komitmen tulus terhadap perempuan di Afghanistan. Maka, dapat disimpulkan bahwa meskipun pada awalnya retorika perang untuk membebaskan perempuan Afghanistan oleh Amerika berhasil mendapatkan dukungan, pada kenyataannya, invasi Amerika membawa penderitaan yang berkelanjutan bagi perempuan Afghanistan dan menunjukkan ketidakjujuran serta hipokrisi dalam justifikasi Amerika untuk invasi yang mereka lakukan.

Perspektif Feminis Poskolonial dapat menunjukkan bahwa narasi pembebasan perempuan Afghanistan oleh Amerika Serikat terutama pasca 9/11 dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik dan dinilai sebagai bentuk imperialisme budaya. Pemerintahan Bush dianggap menyerang simbol-simbol kebudayaan seperti Burqa untuk menggeneralisasi gambaran tirani Taliban dan mendapatkan dukungan dari domestik serta internasional. Bahkan saat ini pun, tanggapan Amerika Serikat dengan apa yang terjadi di Afghanistan masih memiliki pola yang sama. Feminis poskolonial berpendapat bahwa penggambaran perempuan Afghanistan sebagai korban oleh Amerika menunjukkan sikap superioritas Barat serta mengabaikan konteks sosial dan sejarah Afghanistan. Pendekatan tersebut juga hampir mirip dengan retorika imperialis abad ke-19 dan mengabaikan bahwa perkembangan progresif dalam kesetaraan gender di Barat juga merupakan hasil perjuangan panjang. Pengalaman ketertindasan perempuan di Afghanistan direduksi hanya sebatas korban rezim Taliban. Amerika Serikat seakan-akan menyuarakan ketertindasan perempuan Afghanistan. Pada kenyataannya, perempuan Afghanistan mengalami lapisan baru ketertindasan karena tidak diberikan ruang untuk menyuarakan pengalamannya dari sudut pandang mereka sendiri yang telah mengalami berbagai bentuk ketertindasan multidimensional secara historis, kultural, politis, dalam konteks domestik maupun internasional. Dengan demikian, untuk memahami pengalaman ketertindasan perempuan Afghanistan diperlukan ruang seluas-luasnya untuk mereka menyuarakan apa yang mereka alami dengan suara mereka sendiri dan mengurai lapisan-lapisan dominasi dan hirarki kekuasaan yang melanggengkan penindasan tersebut.

Referensi

Buku

- Collins, P. H. 2019. *Intersectionality as critical social theory*. Durham: Duke University Press.
- Dorani, S. 2019. *America in Afghanistan: Foreign policy and decision making from Bush to Obama to Trump*. London: Bloomsbury Publishing Plc I.B. Tauris.
- Hankivsky, O. 2014. *Intersectionality 101*. Canada: The Institute for Intersectionality Research & Policy.
- Maley, W., dan S. Schmeidl, 2015. *Reconstructing Afghanistan*. New York: Routledge.
- Runion, M. L. 2017a. *The history of Afghanistan*. Bloomsbury Publishing USA.
- Sharan, T. 2023. *Insight Afghanistan: Political networks, informal orders, and state disruption*. London: Routledge.
- Spivak, G. C. 1988. Can the subaltern speak? In *Marxism and the interpretation of culture*. Urbana/Chicago. Retrieved from <https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/09/Can-the-subaltern-speak-by-Gayatri-Spivak.pdf>
- Telesetsky, A. 1998. *In the shadows and behind the veil: Women in Afghanistan under Taliban rule*. Retrieved from <https://lawcat.berkeley.edu/record/1116273/files/fulltext.pdf>

Artikel Jurnal

- Akbari, F., dan J. True, 2024, January. "Bargaining with Patriarchy in Peacemaking: The Failure of Women, Peace, and Security in Afghanistan", *Global Studies Quarterly*, 4(1). <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksae004>.
- Alm, D. 2021. "The US invasion of Afghanistan: A justified war?". <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1575088/FULLTEXT01.pdf>.
- Alvi, H. 2011. "Women in Afghanistan: A Human Rights Tragedy Ten Years After After 9/11". *Human Rights and Human Welfare*, 11(1): 1-23. <https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1644&context=hrhw>.

- Al-wazedi, U. 2020. "Postcolonial Feminism", *Companion to Feminist Studies*, 155–173. <https://doi.org/10.1002/9781119314967.ch9>.
- Bahri, J. 2014. "Western Gender Policies in Afghanistan: Failing Women and Provoking Men", *Gender, Technology and Development*, 18(2): 163–185. <https://doi.org/10.1177/0971852414529480>.
- Bennoune, K. 2024. "International Obligation to Counter Gender Apartheid in Afghanistan", *Feminist Dissent*, 7, 14–102. <https://doi.org/10.31273/fd.n7.2023.1506>.
- Bunch, C. 1990. "Women's Rights as Human Rights: Toward a Re-Vision of Human Rights", *Human Rights Quarterly*, 12.
- Crenshaw, K. 1989. "Demarginalizing The Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics", *U. Chi. Legal F.*, 139.
- Diyarbakirlioglu, K., dan Yigit, S. 2017. "The Women of Afghanistan: Past and Present Challenges", *Journal of Social Science Studies*, 4(2):208. <https://doi.org/10.5296/jsss.v4i2.11349>.
- Gossman, P. 2021. "How US-Funded Abuses Led to Failure in Afghanistan", *Human Rights Watch*. <https://www.hrw.org/news/2021/07/06/how-us-funded-abuses-led-failure-afghanistan>.
- Hunt, K. 2002. "The Strategic Co-optation of Women's Rights", *International Feminist Journal of Politics*, 4(1): 116–121. <https://doi.org/10.1080/14616740110108749>.
- Kandiyoti, D. 2007. "Between the Hammer and the Anvil: post-conflict reconstruction, Islam and women's rights", *Third World Quarterly*, 28(3):503-517. https://www.researchgate.net/profile/Deniz-Kandiyoti/publication/233658348_Between_the_Hammer_and_the_Anvil_Post-conflict_Reconstruction_Islam_and_Women's_Rights/links/5729c52a08aef5d48d2edbe9/Between-the-Hammer-and-the-Anvil-Post-conflict-Reconstruction-I.
- Mohanty, C. T. 1984. "Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses", *Boundary 2*, 12(3): 333–358.
- Moghadam, V. 2021. "Iran and the United States: What Might a Feminist Foreign Policy Look Like?", *Peace and Freedom; Philadelphia*, 81(1): 4–6. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/iran-united-states-what-might-feminist-foreign/docview/250573011/se-2>.

- Møller, S. 2021. "Do Afghan women need saving? A Critical Discourse Analysis of Laura Bush's representation of the women in Afghanistan", *DIVA*. <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1593580&dswid=5776>.
- Russo, A. 2006. "The Feminist Majority Foundation's Campaign to Stop Gender Apartheid", *International Feminist Journal of Politics*, 8(4): 557-580. <https://doi.org/10.1080/14616740600945149>.
- Saleh, S. 2020. "College of Liberal and Creative Arts Journal Staff Editorial Policy Acknowledgments", *INTERNATIONAL RELATIONS JOURNAL* (9):66-73 https://internationalrelations.sfsu.edu/sites/default/files/documents/IR_Journal_Final%202020.pdf#page=67.
- Shepherd, L. J. 2006, March. "CONSTRUCTIONS OF GENDER IN THE BUSH ADMINISTRATION DISCOURSE ON THE ATTACKS ON AFGHANISTAN POST-9/11", *International Feminist Journal of Politics*, 8(1): 19-41. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/30431662/Shepherd_2006-libre.pdf?1390888157=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DVeiled_References_Constructions_of_Gende.pdf&Expires=1717507910&Signature=b1RGPo8RxHoisINf7IvTAD2-SLOPzsrBmBXPcY2~hSlIDFYWs.
- Song, S. 2013. "Feminists Rethink Multiculturalism: Resisting Essentialism and Cross-Cultural Hypocrisy", *The Ashgate Research Companion to Feminist Legal Theory*, 151-168. <https://doi.org/10.4324/9781315612973.ch8>.
- Sumitra, S., Ramin Hakimy, M., & Abou Rokba, B. 2023. "Afghan Women After Talibanization", *MUDIMA*, 3(1):229-423. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i1.2605>.
- Tzenios, N. 2023. "Case Study: Just War Doctrine", *Open Journal of Political Science*, 13(01):1-17. <https://doi.org/10.4236/ojps.2023.131001>.
- Zine, J. 2006. "Between Orientalism and Fundamentalism: The Politics of Muslim Women's Feminist Engagement", *Muslim World Journal of Human Rights*, 3(1). <https://doi.org/10.2202/1554-4419.1080>.

Artikel Daring

- Abouesh, B. 2020. "Orientalism In The West. Defiant" [Online]. dalam <https://thedefiantmovement.org/articles/2020/2/21/orientalism-in-the-west#:~:text=Orientalism%20can%20be%20defined%20as> [Diakses 4 Juni 2024].

- Afghan Women and Girls, n.d., “Feminist Majority Foundation” [Online]. dalam <https://feminist.org/our-work/afghan-women-and-girls/> [Diakses 4 Juni 2024].
- Amnesty.org, 2022. “Women in Afghanistan: the Back Story. Amnesty UK” [Online]. dalam <https://www.amnesty.org.uk/womens-rights-afghanistan-history> [Diakses 4 Juni 2024].
- Feminist Majority Foundation, 2001. “Bush Administration Declares Strong Support for Afghan Women. Feminist Majority Foundation” [Online]. dalam <https://feminist.org/news/bush-administration-declares-strong-support-for-afghan-women> [Diakses 4 Juni 2024]
- Gallagher, A. 2019. “To Protect Afghan Women’s Rights, U.S. Must Remain Engaged. United States Institute of Peace” [Online]. dalam <https://www.usip.org/publications/2019/10/protect-afghan-womens-rights-us-must-remain-engaged> [Diakses 4 Juni 2024].
- Graham-Harrison, E., dan Borger, J. 2020. “Trump’s Afghanistan withdrawal announcement takes US officials by surprise. The Guardian” [Online]. dalam <https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/08/donald-trump-afghanistan-us-troops-taliban> [Diakses 4 Juni 2024].
- International Rescue Committee, 2022. Afghanistan: “An entire population pushed into poverty | International Rescue Committee (IRC)” [Online]. dalam <https://www.rescue.org/article/afghanistan-entire-population-pushed-poverty> [Diakses 4 Juni 2024].
- Kabir, N. 2012. “Women’s position in Afghanistan since 9/11” [Online]. dalam <https://www.unisa.edu.au/siteassets/episerver-6-files/documents/eass/mnm/commentaries/kabir-womens-position-in-afghanistan.pdf> [Diakses 4 Juni 2024].
- Miller, S. H. 2010. “REPRESENTING AFGHAN WOMEN IN POST-9/11 MEDIA AND FEMINIST DISCOURSE” [Online]. dalam <https://sfsu-dspace.calstate.edu/bitstream/handle/10211.3/98359/AS362010WOMSTM55.pdf?sequence=1> [Diakses 4 Juni 2024].
- Mohsin, S. 2021. “US freezes Afghan central bank’s assets of \$9.5bn” [Online]. dalam <https://www.aljazeera.com/economy/2021/8/18/us-freezes-afghan-central-banks-assets-of-9-5bn> [Diakses 4 Juni 2024].
- News, N. 2005. “Military releases nearly 1,000 Iraqi detainees. NBC News” [Online]. dalam <https://www.nbcnews.com/id/wbna9092602> [Diakses 4 Juni 2024].

News, N. 2005. "Military releases nearly 1,000 Iraqi detainees. NBC News" [Online]. dalam <https://www.nbcnews.com/id/wbna9092602> [Diakses 4 Juni 2024].

OHCHR, 2021. "Afghanistan: Women's full participation in public and political life is crucial. OHCHR" [Online]. dalam <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/09/afghanistan-womens-full-participation-public-and-political-life-crucial> [Diakses 4 Juni 2024].

UNESCO, 2024. 'Afghanistan: 1.4 million girls still banned from school by de facto authorities. Unesco.org" [Online]. dalam <https://www.unesco.org/en/articles/afghanistan-14-million-girls-still-banned-school-de-facto-authorities> [Diakses 4 Juni 2024].

Popal, F., dan Walsh, C. 2021. "U.S. Efforts to Protect Afghan Women and Girls. George W. Bush Presidential Center" [Online]. dalam <https://www.bushcenter.org/publications/u-s-efforts-to-protect-afghan-women-and-girls> [Diakses 4 Juni 2024].

Smith, G. 2024. "Afghanistan Three Years after the Taliban Takeover. International Crisis Group" [Online]. dalam <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistan-three-years-after-taliban-takeover> [Diakses 4 Juni 2024].

Women and Conflict: An Uphill Battle, 2024. "Women and conflict: An uphill battle. Concern Worldwide US" [Online]. dalam <https://concernusa.org/news/women-and-conflict-uphill-battle/> [Diakses 4 Juni 2024].

Tesis atau Disertasi

Alm, D. 2021. The US invasion of Afghanistan: A justified war? (pp. 19–21). Tesis. Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1575088/FULLTEXT01.pdf>

Lindvall, C. 2023. The Decline of Women's Rights: A Case Study About Women's Rights in Afghanistan. Tesis. Kalmar: Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies. <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1763150&dswid=3887>

Pacwa, J. 2019. "War on Terror as a "fight for the rights and dignity of women": a discourse analysis of the U.S. "liberation" campaign for Afghan women. Theses and Dissertations. California : Department of Political Science, Frank R. Seaver College of Letters, Arts, and Sciences <https://digitalcommons.pepperdine.edu/etd/1101/>

Siaran Pers

- Bush, L. 2001. *Radio Address by Mrs. Bush. George W. Bush WhiteHouse Archives* [Press Release], <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/20011117.html>, issued 17 November 2001.
- Bush, L. 2006. *Mrs. Bush's Remarks in a U.S. Afghan Women's Council Roundtable* [Press Release], Issued 5 July 2006.
- United Nations Assistance Mission in Afghanistan, & United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2020. *In Search of Justice for Crimes of Violence Against Women and Girls* [Press Release], https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/AF/UNAMA_OHCHR_Violence_Women.pdf Issued December 2020.